

Dampak korupsi terhadap pendapatan daerah pada era desentralisasi fiskal di Indonesia

Haryono Pasang Kamase^{a*}, Gilbert Pore^b, Muhammad Ikbal Abdullah^c,
Nina Yusnita Yamin^d

Universitas Tadulako. Jl. Soekarno Hatta No.Km. 9, Kota Palu, 94148, Indonesia

^a haryonokamase@untad.ac.id; ^b gilbertpore47@gmail.com; ^c ikbalabdullah@untad.ac.id; ^d nyusnita.untad@gmail.com

* Corresponding Author

Abstrak: Penelitian ini mengkaji dampak korupsi terhadap pendapatan asli daerah tingkat provinsi di Indonesia selama era desentralisasi fiskal, dengan menyoroti pentingnya bagi kebijakan ekonomi dan tata kelola pemerintahan. Studi ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana korupsi memengaruhi hasil ekonomi dalam sistem tata kelola yang terdesentralisasi, dengan mengajukan hipotesis bahwa korupsi dapat memfasilitasi aktivitas ekonomi dengan mempercepat proses birokrasi. Menggunakan data sekunder dari Kementerian Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia dari tahun 2017 hingga 2019, penelitian ini menerapkan analisis statistik deskriptif dan korelasi Pearson untuk mengkaji dampak tingkat korupsi terhadap realisasi pendapatan asli daerah. Hasilnya menunjukkan adanya dampak positif yang kuat dan signifikan secara statistik, yang mengindikasikan bahwa dalam jangka pendek, korupsi dapat berperan sebagai “grease the wheel” di wilayah yang mengalami ketidakefisienan birokrasi. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi pembuat kebijakan dan praktisi, menekankan perlunya menyeimbangkan efisiensi proses ekonomi dengan langkah-langkah antikorupsi yang kuat. Studi ini berkontribusi pada pengetahuan yang ada dengan memberikan bukti empiris dari konteks Indonesia dan mengidentifikasi area untuk penelitian lebih lanjut guna mengeksplorasi dampak lebih luas dari korupsi dalam kerangka desentralisasi fiskal.

Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal; Indonesia; Korupsi; Pendapatan Asli Daerah; Tata Kelola Ekonomi

How to Cite: Kamase, H. P., Pore, G., Abdullah, M. I., & Yamin, N. (2024). The impact of corruption on local revenue in Indonesia's fiscal decentralization era. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 10(2), 187-196. <https://doi.org/10.32697/integritas.v10i2.1292>



Pendahuluan

Korupsi telah lama diakui sebagai hambatan signifikan terhadap pembangunan ekonomi, yang mana sering kali menghalangi pertumbuhan dan memperburuk ketidaksetaraan. Namun, dalam konteks tertentu, korupsi secara paradoksal telah diamati dapat memfasilitasi aktivitas ekonomi, terutama di negara-negara berkembang dengan tata kelola yang buruk dan faktor kelembagaan yang lemah, seperti perlindungan hak yang tidak memadai (Kargin-Akkoc & Durusu-Ciftci, 2024; Yung et al., 2023), birokrasi yang kompleks, dan lingkungan regulasi yang lemah (Arif et al., 2023). Fenomena ini dikenal sebagai hipotesis klasik “grease the wheels” atau “helping hand”. Hipotesis ini berpendapat bahwa dalam kondisi tertentu, korupsi mempercepat proses birokrasi, membuatnya lebih efisien dan menghindari regulasi yang memberatkan (Arif et al., 2023); menghindari hukuman (Dastidar & Jain, 2023); mengurangi ketidakpastian (Yung et al., 2023); serta memungkinkan akses terhadap kontrak pemerintah daerah, izin masuk pasar, atau subsidi pemerintah (Kutlu & Mao, 2023). Dalam konteks ini, korupsi mendorong pembangunan ekonomi, yang menyiratkan bahwa peningkatan langkah-langkah antikorupsi dapat menyebabkan penurunan ekonomi (Kargin-Akkoc & Durusu-Ciftci, 2024).

Literatur mengenai korupsi dan kinerja ekonomi menampilkan dikotomi perspektif. Di satu sisi, banyak penelitian telah mendokumentasikan dampak merugikan dari korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi, dan kepercayaan publik (Afonso & de Sá Fortes Leitão Rodrigues, 2022; Mamo et al., 2024; Mauro, 1995, 1996; Tanzi & Davoodi, 1997; Uddin & Rahman, 2023; World Bank, 2023; Zhang et al., 2023). Korupsi umumnya dikaitkan dengan peningkatan

biaya transaksi, ketidakpastian, dan penyimpangan alokasi sumber daya, yang mana secara kolektif merusak stabilitas dan pembangunan ekonomi. Di sisi lain, beberapa peneliti berpendapat bahwa dalam situasi tertentu, korupsi dapat berperan sebagai pelumas yang mengurangi ketidakefisienan birokrasi, sehingga berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi (Arif et al., 2023; Arsandi, 2022b, 2022a; Fisman et al., 2024; Kargin-Akkoc & Durusu-Ciftci, 2024; Quoc Bui et al., 2021; Spyromitros & Panagiotidis, 2022). Paradoks ini terutama terlihat di wilayah yang memiliki kerangka regulasi yang rumit, yang mana pembayaran informal dapat memfasilitasi transaksi yang lebih lancar dan cepat.

Meskipun penelitian tentang korupsi telah sangat luas, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman mengenai dampak korupsi yang lebih rinci dalam kerangka desentralisasi fiskal, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Tujuan sesungguhnya desentralisasi fiskal adalah memperbaiki tata kelola dengan mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat lokal, namun hal ini juga dapat mendesentralisasi peluang untuk korupsi. Beberapa studi memberikan bukti yang bertentangan mengenai apakah desentralisasi mengurangi atau justru memperburuk korupsi (Alfada, 2019; Fisman & Gatti, 2002; Fjeldstad, 2004; and Martinez-Vazquez et al., 2017). Selain itu, dampak korupsi terhadap hasil ekonomi tertentu, seperti pendapatan asli daerah, masih kurang dieksplorasi. Kesenjangan ini penting karena mempertanyakan efektivitas desentralisasi fiskal dalam mengekang korupsi dan mendorong pembangunan ekonomi. Untuk mengisi kesenjangan ini, penelitian ini menggunakan pendapatan asli daerah yang sebenarnya (pendapatan asli daerah yang terealisasi) sebagai proksi untuk pendapatan asli daerah, yang selanjutnya disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD). Alasan utama menggunakan PAD yang sebenarnya sebagai proksi adalah karena PAD tersebut menyediakan ukuran yang lebih konkret dibandingkan dengan PAD yang dianggarkan.

Penelitian ini ditujukan kepada para pembuat kebijakan, peneliti akademis, dan praktisi antikorupsi dengan menyoroti isu penting namun kurang dieksplorasi mengenai dampak korupsi terhadap PAD di provinsi-provinsi Indonesia. Mengingat upaya Indonesia yang sedang berlangsung dalam menerapkan desentralisasi yang efektif, pemahaman tentang peran ganda korupsi menjadi sangat penting untuk merancang kerangka tata kelola yang lebih baik. Temuan penelitian ini memiliki implikasi baik secara teoretis maupun praktis, yang mana berpotensi menjadi panduan bagi reformasi kebijakan di masa depan yang bertujuan untuk mengurangi korupsi sambil mengoptimalkan manfaat ekonomi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak korupsi terhadap PAD pada tingkat provinsi di Indonesia selama era desentralisasi fiskal. Dengan menganalisis data dari tahun 2017 hingga 2019, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap literatur yang ada dengan menyediakan bukti empiris mengenai apakah korupsi berperan sebagai penghambat atau fasilitator ekonomi dalam konteks desentralisasi fiskal. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi mekanisme bagaimana korupsi memengaruhi hasil ekonomi di tingkat daerah, sehingga dapat memberikan informasi bagi intervensi kebijakan yang bertujuan meningkatkan tata kelola dan kinerja ekonomi.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif untuk mengevaluasi dampak korupsi terhadap PAD tingkat provinsi di Indonesia selama periode desentralisasi fiskal. Metodologi ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dampak tingkat korupsi terhadap PAD, serta memberikan wawasan yang jelas mengenai mekanisme bagaimana korupsi memengaruhi hasil ekonomi.

Penelitian ini bersifat kuantitatif, dengan fokus pada analisis statistik data numerik untuk mengidentifikasi pola dan kausalitas variabel. Tujuan utama adalah untuk mengukur dampak korupsi terhadap PAD dan menentukan apakah terdapat korelasi yang signifikan antara keduanya. Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif, bertujuan untuk memberikan gambaran akurat mengenai karakteristik korupsi dan dampaknya terhadap PAD. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan, analisis, dan penyajian data untuk menggambarkan kondisi terkini mengenai korupsi dan pendapatan daerah di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari dua sumber utama: Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan KPK (lihat Tabel 1). Pemilihan data tingkat provinsi dilakukan secara hati-hati, mengingat desentralisasi fiskal di Indonesia memberikan otonomi ekonomi yang signifikan kepada pemerintah provinsi, sehingga menjadikannya unit analisis yang penting untuk memahami dampak korupsi.

Periode observasi dari tahun 2017 hingga 2019 dipilih berdasarkan beberapa alasan yang kuat. Pertama, periode ini menandai fase matang dari desentralisasi fiskal di Indonesia, sehingga memudahkan pemeriksaan dampak jangka panjangnya. Meskipun data dari KPK tersedia sejak tahun 2004, kami memilih menggunakan data yang lebih komprehensif dari tahun 2017. Keputusan ini didasarkan pada pemekaran beberapa provinsi di Indonesia hingga tahun 2016 (misalnya, Maluku Utara, Banten, Kalimantan Utara, dan lainnya) yang datanya baru tersedia pada tahun 2017. Kami mengecualikan data dari tahun 2020 hingga 2022 karena situasi luar biasa akibat pandemi COVID-19, yang menimbulkan risiko signifikan terhadap validitas data. Kedua, penggunaan data terbaru memastikan relevansi dan penerapan temuan kami terhadap diskusi kebijakan saat ini. Data KPK dipilih karena kasus-kasus korupsi yang telah terverifikasi, sehingga menjamin akurasi dan keandalan pengukuran korupsi. Kami menggunakan jumlah kasus yang diverifikasi oleh KPK sebagai proksi untuk korupsi, karena metode ini lebih objektif dibandingkan dengan pengukuran indeks persepsi korupsi. KPK memverifikasi laporan korupsi dari masyarakat untuk memastikan bahwa kasus-kasus tersebut layak mendapatkan perhatian. Untuk memenuhi syarat, laporan tersebut harus memenuhi kriteria tertentu, termasuk adanya unsur korupsi dan kerugian negara setidaknya lebih dari satu miliar rupiah. Jika kasus korupsi tidak memenuhi kriteria ini, maka akan dialihkan ke aparat penegak hukum lainnya, seperti kepolisian atau kejaksaan. Selain itu, catatan keuangan dari Kementerian Keuangan menyediakan dokumentasi yang komprehensif tentang PAD, sehingga ideal untuk menilai hasil ekonomi. Dalam studi ini, pendapatan asli daerah diproksikan ke realisasi PAD. Penggunaan realisasi PAD lebih relevan karena menawarkan ukuran yang lebih konkret dan akurat dibandingkan PAD yang masih dalam bentuk anggaran.

Metode analisis dalam penelitian ini melibatkan beberapa langkah utama. Pertama, analisis statistik deskriptif merangkum fitur-fitur dasar dari data, termasuk rata-rata, standar deviasi, dan distribusi. Statistik deskriptif memberikan gambaran umum tentang tren dan variasi kasus korupsi serta PAD di berbagai provinsi. Kedua, uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan validitas model regresi. Ketiga, analisis korelasi Pearson digunakan untuk menguji dampak tingkat korupsi terhadap realisasi PAD. Koefisien korelasi (r) dan nilai p dihitung untuk menentukan kekuatan dan signifikansinya. Terakhir, analisis regresi digunakan untuk mengukur dampak korupsi terhadap PAD. Model regresi membantu mengidentifikasi sejauh mana perubahan tingkat korupsi memengaruhi PAD, memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai hubungan antara kedua variabel tersebut. Data dianalisis menggunakan perangkat lunak SPSS versi 23.

Penelitian ini berfokus pada analisis korupsi yang dilaporkan oleh KPK, dengan mempertimbangkan jumlah kasus korupsi yang terverifikasi di tingkat provinsi sebagai ukuran utama korupsi. Pemangku kepentingan dalam isu korupsi meliputi pemerintah provinsi, yang mana bertanggung jawab atas pengumpulan PAD dan secara langsung dipengaruhi oleh korupsi. Dengan menganalisis hubungan antara kasus korupsi dan PAD, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sejauh mana korupsi memengaruhi kinerja ekonomi pemerintah provinsi.

Pengembangan hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada argumen logis yang didukung oleh bukti empiris dan teori "*grease the wheel*", berpendapat bahwa dalam lingkungan yang ditandai dengan tata kelola yang buruk, institusi yang lemah, perlindungan hak kepemilikan yang tidak memadai, birokrasi yang kompleks, dan kerangka regulasi yang lemah, korupsi dapat bertindak sebagai mekanisme untuk mempercepat birokrasi dan memfasilitasi aktivitas ekonomi (Arif et al., 2023; Arsandi, 2022b, 2022a; Fisman et al., 2024; Kargin-Akkoc & Durusu-Ciftci, 2024; Spyromitros & Panagiotidis, 2022; Yung et al., 2023). Hipotesis tersebut dipertentangkan dengan teori "*sand in the wheels*," yang berargumen bahwa korupsi meningkatkan biaya transaksi, menciptakan ketidakpastian, dan mengalokasikan sumber daya secara salah, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi (Afonso & de Sá Fortes Leitão Rodrigues, 2022; Mamo et al.,

2024; Mauro, 1995, 1996; Tanzi & Davoodi, 1997; Uddin & Rahman, 2023; World Bank, 2023; Zhang et al., 2023).

Bukti empiris dari berbagai penelitian memberikan kesimpulan yang saling bertentangan. Misalnya, penelitian telah menunjukkan bahwa korupsi memperlancar pertumbuhan ekonomi di beberapa negara Asia seperti Cina dan Korea Selatan (Huang, 2016), di mana korupsi memiliki dampak positif terhadap operasi bisnis dengan menghindari birokrasi yang berbelit-belit untuk mempercepat proses (Arif et al., 2023; Arsandi, 2022b; Fisman et al., 2024). Sebaliknya, studi lain menyoroti dampak negatif korupsi terhadap pengembangan ekonomi dan kepercayaan publik (Afonso & de Sá Fortes Leitão Rodrigues, 2022; Mamo et al., 2024; Uddin & Rahman, 2023; World Bank, 2023; Zhang et al., 2023). Dalam konteks Indonesia, kerangka pemerintahan terdesentralisasi menghadirkan skenario unik yang mana dampak korupsi terhadap ekonomi daerah memerlukan investigasi mendalam. Mengingat desentralisasi fiskal di Indonesia, yang mana pemerintah provinsi memiliki otonomi yang lebih besar atas aktivitas ekonomi, mungkin saja korupsi dapat berperan ganda. Penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Tingkat kasus korupsi yang lebih tinggi berkorelasi positif dengan peningkatan realisasi PAD di tingkat provinsi di Indonesia selama periode desentralisasi fiskal.

Hipotesis ini menyarankan bahwa bertentangan dengan persepsi umum mengenai korupsi sebagai kekuatan yang sepenuhnya merugikan, mungkin ada konteks yang mana korupsi berperan sebagai fasilitator, terutama di daerah yang mengalami inefisiensi birokrasi. Dengan menguji hipotesis ini, penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada perdebatan yang sedang berlangsung mengenai hubungan kompleks antara korupsi dan kinerja ekonomi.

Hasil dan Pembahasan

Hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa tiga puluh empat provinsi di Indonesia mengalami peningkatan kasus korupsi secara keseluruhan dari tahun 2017 hingga 2019 (lihat Tabel 1). Total kasus korupsi tingkat provinsi di Indonesia meningkat dari 5.945 kasus pada tahun 2017 menjadi 6.200 kasus pada tahun 2018, sebelum sedikit menurun menjadi 6.138 kasus pada tahun 2019. Kasus korupsi tingkat provinsi terendah dilaporkan di Kalimantan Timur pada tahun 2018, yaitu sebanyak 13 kasus, yang kemudian meningkat menjadi 166 kasus pada tahun 2019. Sebaliknya, kasus korupsi tertinggi dilaporkan di DKI Jakarta pada tahun 2019, yaitu sebanyak 893 kasus, meningkat dari 840 kasus pada tahun 2017 dan 855 kasus pada tahun 2018. Jumlah total kasus korupsi yang terverifikasi menurun dari tahun 2018 ke tahun 2019, terutama karena KPK mengalihkan fokus dari penindakan ke pencegahan. Namun, kasus yang belum terverifikasi pada tahun 2019 meningkat signifikan, yaitu sebanyak 6.804 (KPK, 2023). Jika dilihat sekilas, pengamatan ini menunjukkan bahwa keterbukaan media selama era reformasi memberdayakan masyarakat untuk melaporkan korupsi di lingkungan mereka. Namun, keterbukaan media relatif tidak berubah meskipun ada peningkatan kasus yang dilaporkan dari tahun 2017 ke tahun 2019. Meskipun demikian, penelitian ini tidak bertujuan untuk mengkaji dampak spesifik keterbukaan media terhadap tingkat pengungkapan kasus korupsi.

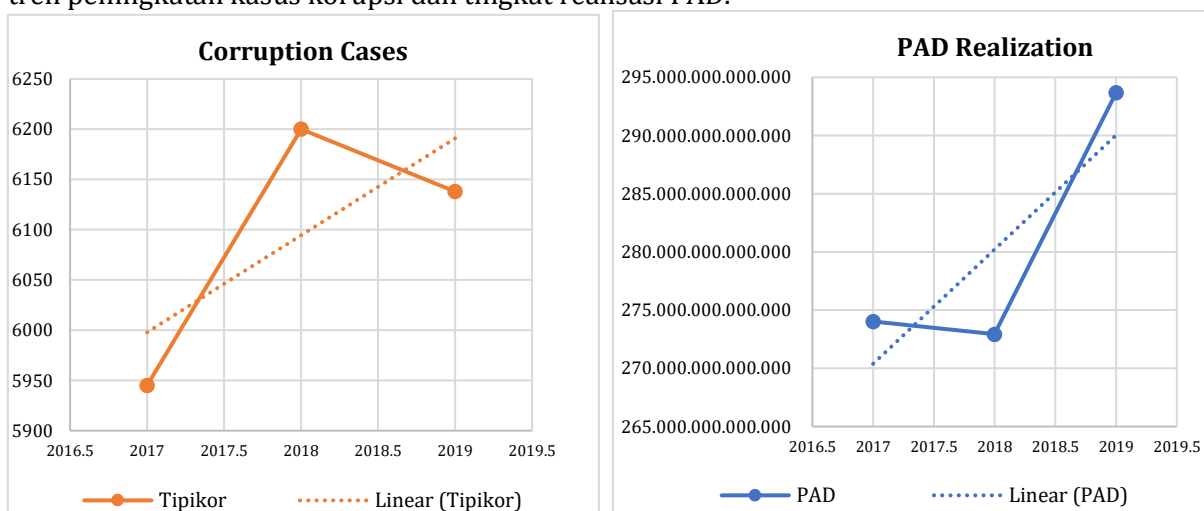
Tabel 1. Data Tingkat Korupsi dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi di Indonesia (2017 – 2019)

Provinsi	Tindak Pidana Korupsi ¹			PAD (dalam juta Rp) ²		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Aceh	81	99	124	4.956,144	5.143.153	5.549.651
Sumatera Utara	489	545	518	10.732.002	10.831.006	11.312.405
Sumatera Barat	147	137	118	4.663.165	4.198.604	4.426.443
Riau	245	193	177	6.299.532	6.038.849	6.176.294
Jambi	138	124	116	2.859.653	2.868.830	2.949.172
Sumatera Selatan	401	280	289	6.092.482	6.266.512	6.645.692
Bengkulu	117	87	92	1.464.273	1.598.699	1.527.820
Lampung	116	170	171	4.524.758	4.605.336	5.105.916
Bangka Belitung	28	49	51	1.643.273	1.687.215	1.634.945
Riau Kepulauan	58	47	81	3.013.883	3.214.701	3.467.482
Banten	182	184	184	14.711.440	14.673.803	15.763.359

Provinsi	Tindak Pidana Korupsi ¹			PAD (dalam juta Rp) ²		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
DKI Jakarta	840	855	893	43.901.489	43.327.137	45.707.400
Jawa Barat	566	639	553	41.400.148	40.240.462	44.150.909
Jawa Tengah	394	401	395	26.945.326	26.766.784	28.648.042
DI Yogyakarta	40	73	75	4.349.902	4.503.176	4.742.512
Jawa Timur	605	665	571	37.263.120	37.000.782	39.344.673
Kalimantan Barat	97	96	67	3.888.721	4.035.131	4.179.911
Kalimantan Tengah	95	101	148	2.741.703	2.884.500	3.212.109
Kalimantan Selatan	158	156	129	4.869.697	5.461.512	5.650.042
Kalimantan Timur	146	13	166	7.048.343	8.138.182	9.537.631
Kalimantan Utara	21	178	166	826.826	917.854	1.057.175
Sulawesi Utara	87	130	93	2.277.757	2.280.239	2.380.359
Sulawesi Tengah	57	56	49	2.428.171	2.284.473	2.475.587
Sulawesi Selatan	171	169	173	8.354.954	8.225.142	8.774.005
Sulawesi Tenggara	107	99	94	1.914.316	1.777.335	2.063.338
Sulawesi Barat	17	33	118	805.497	718.911	773.574
Gorontalo	18	52	31	1.018.447	949.713	1.047.309
Bali	64	55	101	10.737.301	11.319.957	12.305.573
Nusa Tenggara Barat	73	90	68	3.994.326	3.286.998	3.598.012
Nusa Tenggara Timur	117	178	107	3.062.236	2.508.615	2.844.072
Maluku	67	68	82	926.925	1.013.417	1.045.205
Maluku Utara	24	34	36	845.989	841.298	990.259
Papua	118	100	78	2.480.746	2.389.421	3.496.501
Papua Barat	61	44	24	990.127	937.412	1.094.133
Total	5.945	6.200	6.138	274.032.670	272.935.159	293.677.511

Sumber: (1) Laporan tahunan KPK (diakses pada 14 November, 2023); dan (2) laporan Kementerian Keuangan (diakses pada 14 November, 2023)

Tabel 1 menunjukkan bahwa realisasi PAD tingkat provinsi di Indonesia meningkat dari tahun 2017 hingga 2019, seiring dengan peningkatan kasus tindak pidana korupsi (selanjutnya disebut Tipikor). Total realisasi PAD menurun dari Rp274.032.670 juta pada tahun 2017 menjadi Rp272.935.159 juta pada tahun 2018, dan selanjutnya meningkat menjadi Rp 293.677.511 juta pada tahun 2019. Tingkat PAD terendah yang dilaporkan berada di provinsi Sulawesi Barat, sekitar Rp718.911,131 juta pada tahun 2018, sedangkan yang tertinggi terdapat di provinsi DKI Jakarta, sekitar Rp45.707.400,004 juta pada tahun 2019. Gambar 1 di bawah ini menunjukkan tren peningkatan kasus korupsi dan tingkat realisasi PAD.



Gambar 1. Tren Kasus Korupsi dan Realisasi PAD (2017 – 2019) di Indonesia

Hasil Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai distribusi dan tendensi sentral dari variabel-variabel kunci (lihat Tabel 2). Rata-rata (*mean*) jumlah kasus korupsi yang dilaporkan di

tingkat provinsi antara tahun 2017 hingga 2019 adalah 179,25 kasus, dengan simpangan baku (*standard deviation*) sebesar 193,59. Simpangan baku sebesar 193,594 menunjukkan bahwa jumlah kasus korupsi di setiap provinsi bervariasi sekitar 193,594 kasus dari rata-rata 179,25 kasus. Semakin besar simpangan baku, semakin besar variasi jumlah kasus korupsi antar provinsi. Di sisi lain, rata-rata PAD adalah sebesar Rp8.241.620.970.019, dengan simpangan baku sebesar Rp11.586.484.987.421. Simpangan baku sebesar Rp11.586.484.987.421,258 menunjukkan bahwa PAD di setiap provinsi bervariasi sekitar Rp11.586.484.987.421,258 dari rata-rata Rp8.241.620.970.018,98. Simpangan baku yang besar ini menunjukkan adanya variasi yang signifikan dalam PAD antar provinsi. Simpangan baku memberikan wawasan mengenai penyebaran data. Dalam hal ini, data Tipikor menunjukkan variasi yang cukup besar, meskipun tidak sebesar variasi yang terlihat pada data PAD. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat variabilitas yang signifikan dalam jumlah kasus korupsi antar provinsi, variasi dalam PAD jauh lebih signifikan.

Tabel 2. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif Variabel Kasus Korupsi dan PAD

	Corruption Cases (Tipikor)	PAD
Valid N (listwise)	102	102
Minimum	13	718911131164
Maximum	893	45707400003802
Mean	179,25	8241620970018,98
Std. Deviation	193,594	11586484987421,258

Sumber: dielaborasi dari output SPSS veris 23 (2024)

Analisis statistik deskriptif mengungkapkan adanya variasi signifikan dalam tingkat korupsi dan PAD di berbagai provinsi di Indonesia. Rata-rata dan simpangan baku menunjukkan tingkat korupsi dan PAD rata-rata, serta sejauh mana variasi terjadi di antara provinsi-provinsi tersebut. Variasi ini penting untuk memahami hubungan antara korupsi dan PAD, karena menunjukkan bahwa beberapa provinsi mengalami tingkat korupsi yang lebih tinggi dan hasil PAD yang berbeda.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil uji asumsi klasik memastikan bahwa model regresi valid, meliputi uji normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas yang relevan dengan model penelitian ini. Untuk memastikan keakuratan model regresi kami, langkah pertama adalah memastikan bahwa residual (selisih antara nilai yang diobservasi dan yang diprediksi) berdistribusi normal. Uji Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk tujuan ini. Dalam penelitian kami, hasil uji menunjukkan nilai p (p value) sebesar 0,200 (lihat Tabel 3). Karena nilai ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Hal ini penting karena normalitas residual merupakan salah satu asumsi kunci dalam analisis regresi, yang memastikan validitas uji statistik yang digunakan.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

	Unstandardized Residual
N	102
Normal Parameters	Mean Std. Deviation
	,0000000 ,69717146
Most Extreme Differences	Absolute Positive Negative
	,053 ,053 -,047
Test Statistic	,053
Asymp. Sig. (2-tailed)	,200

Sumber: dielaborasi dari output SPSS versi 23 (2024)

Heteroskedastisitas merujuk pada situasi yang mana variabilitas residual tidak konsisten di seluruh tingkat variabel independen. Untuk menilai hal ini, kami menggunakan uji Breusch-Pagan. Hasil penelitian kami menunjukkan nilai p (p -value) sebesar 0,931, yang jauh lebih besar dari ambang batas 0,05 (lihat Tabel 4). Hal ini menunjukkan bahwa varians residual konstan di seluruh pengamatan, sehingga data kami tidak mengalami heteroskedastisitas. Konsistensi ini sangat

penting karena heteroskedastisitas dapat menyebabkan estimasi yang tidak efisien dan memengaruhi keandalan uji hipotesis.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,512	,235		2,180	,032
LNX	,004	,049	,009	,086	,931

Sumber: dielaborasi dari output SPSS versi 23 (2024)

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk variabel korupsi berada di bawah 2. Nilai ini jauh lebih rendah dari ambang batas yang umum diterima, yaitu 10, yang menunjukkan bahwa multikolinearitas tidak menjadi masalah dalam model kami. Dengan demikian, variabel independen kami menunjukkan tingkat kemandirian yang memadai, sehingga meningkatkan keandalan interpretasi koefisien regresi. Temuan ini masuk akal, mengingat variabel independen secara khusus berfokus pada tingkat korupsi tanpa pengaruh dari variabel independen lainnya. Dengan demikian, tingkat korupsi dalam model regresi ini tidak berkorelasi dengan variabel independen lainnya, yang memperkuat validitas dalam menilai dampak individual korupsi terhadap PAD.

Hasil Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis kami, kami menggunakan analisis korelasi Pearson untuk mengeksplorasi dampak tingkat korupsi terhadap realisasi PAD. Hasil analisis menunjukkan koefisien korelasi (r) sebesar 0,781, dengan nilai p kurang dari 0,01 (Lihat Tabel 5). Hal ini menunjukkan korelasi yang kuat, positif, dan signifikan secara statistik dampak tingkat korupsi terhadap realisasi PAD. Dengan kata lain, hasil ini mendukung hipotesis kami bahwa tingkat korupsi yang lebih tinggi berhubungan dengan realisasi PAD yang lebih tinggi di tingkat provinsi selama periode desentralisasi fiskal di Indonesia. Temuan ini mengindikasikan bahwa, dalam konteks desentralisasi fiskal di Indonesia, korupsi mungkin berperan dalam memfasilitasi kegiatan ekonomi, meskipun hal ini tidak mengesampingkan dampak negatif yang lebih luas dari korupsi terhadap tata kelola dan keadilan ekonomi.

Tabel 5. Hasil Uji Korelasi

		Corruption Cases	PAD
Tipikor	Pearson Correlation	1	,781**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	102	102
PAD	Pearson Correlation	,781**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	102	102

Sumber: Dielaborasi dari output SPSS 23 (2024)

Dampak Korupsi terhadap PAD

Dampak positif tingkat korupsi terhadap realisasi PAD menunjukkan bahwa dalam kerangka desentralisasi fiskal, korupsi dapat memfasilitasi kegiatan ekonomi dengan mempercepat proses birokrasi. Temuan ini sejalan dengan hipotesis "*grease the wheel*" yang berpendapat bahwa korupsi dapat meningkatkan efisiensi ekonomi di lingkungan dengan kerangka regulasi yang rumit. Namun, hal itu tidak meniadakan dampak korupsi yang lebih luas terhadap tata kelola dan keadilan ekonomi.

Meskipun korupsi dapat meningkatkan realisasi PAD secara sementara dengan memfasilitasi transaksi yang lebih cepat, akan tetapi dalam jangka panjang korupsi merusak kepercayaan publik, meningkatkan biaya transaksi, dan menyebabkan penyimpangan alokasi sumber daya. Sebagai contoh, sistem pengendalian internal yang lemah di tingkat pemerintah daerah sering kali menyebabkan penyimpangan keuangan yang menurunkan kepercayaan publik (Adiguna & Sony, 2019). Akuntansi forensik berperan penting dalam mendeteksi dan mencegah korupsi dengan menyediakan mekanisme pengawasan yang efektif (Changwony & Paterson, 2019; Kamase,

2023). Selain itu, tantangan yang dihadapi oleh jaksa dalam memberantas korupsi pada belanja modal pemerintah daerah menggarisbawahi kompleksitas birokrasi dan kurangnya sumber daya yang memadai (Arsandi, 2022b). Faktor-faktor ini berkontribusi pada keberlangsungan korupsi dan perannya yang kompleks dalam kegiatan ekonomi.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pembuat kebijakan. Upaya untuk mengurangi korupsi harus difokuskan pada penguatan pengendalian internal, peningkatan transparansi, dan penyediaan sumber daya yang memadai bagi lembaga penegak hukum. Dengan mengatasi masalah-masalah ini, pembuat kebijakan dapat mengurangi dampak negatif korupsi sekaligus memanfaatkan potensi manfaat ekonominya dalam jangka pendek.

Bukti empiris dari studi sebelumnya mendukung peran ganda korupsi. Misalnya, Wei (1999) menemukan bahwa di beberapa negara Asia, korupsi memfasilitasi operasi bisnis dengan mengurangi keterlambatan birokrasi. Demikian pula, Vial dan Hanoteau (2010) mengamati bahwa korupsi berdampak positif pada pertumbuhan sektor manufaktur di Indonesia selama era Suharto. Namun, manfaat jangka pendek ini sering kali dibayangi oleh efek korupsi yang merugikan dalam jangka panjang terhadap pembangunan ekonomi dan tata kelola, seperti yang disoroti oleh Afonso dan de Sá Fortes Leitão Rodrigues (2022), Mamo dkk. (2024), Mauro (1995), Tanzi dan Davoodi (1997), Uddin dan Rahman (2023), serta Zhang dkk. (2023).

Selain itu, studi khusus tentang Indonesia menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dapat memperburuk korupsi di tingkat lokal. Alfada (2019) menemukan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia telah meningkatkan korupsi dalam pemerintahan daerah. Demikian pula, Henderson dan Kuncoro (2011) menyoroti peran dinamika politik lokal dalam memengaruhi tingkat korupsi. Bukti ini menunjukkan bahwa meskipun desentralisasi bertujuan untuk mendekatkan tata kelola kepada masyarakat, hal ini juga dapat menciptakan peluang bagi korupsi jika tidak disertai dengan pengendalian institusi dan mekanisme akuntabilitas yang kuat.

Simpulan

Penelitian ini menekankan peran signifikan korupsi dalam memengaruhi PAD di tingkat provinsi di Indonesia selama periode desentralisasi fiskal. Hasil penelitian menunjukkan adanya dampak yang kuat, positif, dan signifikan secara statistik dari tingkat korupsi terhadap PAD, yang mengindikasikan bahwa dalam konteks tertentu, korupsi berfungsi sebagai “*grease the wheel*” dengan memfasilitasi kegiatan ekonomi melalui percepatan proses birokrasi. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap perdebatan yang sedang berlangsung mengenai peran ganda korupsi, dengan menyoroti manfaat jangka pendeknya di wilayah-wilayah yang mengalami inefisiensi birokrasi, sekaligus mengakui dampak negatifnya dalam jangka panjang terhadap tata kelola, keadilan ekonomi, dan kepercayaan publik.

Signifikansi dari temuan ini terletak pada potensi penerapannya dalam skenario nyata, khususnya dalam mempengaruhi kebijakan, praktik, dan pengambilan keputusan. Pembuat kebijakan dapat memanfaatkan wawasan ini untuk merancang kerangka tata kelola secara lebih efektif yang menyeimbangkan kebutuhan proses ekonomi yang efisien dengan langkah-langkah antikorupsi yang kuat. Penguatan pengendalian internal, peningkatan transparansi, dan penyediaan sumber daya yang memadai bagi lembaga penegak hukum merupakan langkah penting untuk mengurangi dampak negatif korupsi sambil memanfaatkan potensi manfaat ekonomi jangka pendeknya.

Studi ini menyoroti pentingnya akuntansi forensik dan mekanisme pengawasan yang efektif bagi para praktisi dalam mendeteksi dan mencegah korupsi. Dengan mengatasi kompleksitas birokrasi dan memastikan sumber daya yang memadai, para praktisi dapat berkontribusi pada praktik tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang efek nuansa korupsi dalam konteks desentralisasi fiskal, mengonfirmasi hipotesis bahwa korupsi dapat bertindak sebagai fasilitator ekonomi dalam kondisi tertentu. Studi ini menyatakan bahwa korupsi dapat bertindak sebagai katalis bagi aktivitas ekonomi dengan menghindari inefisiensi birokrasi, mendorong kesepakatan informal, atau mengoptimalkan eksplorasi potensi sumber daya lokal. Namun, peran fasilitatif ini tergantung pada konteks, yang menekankan pentingnya memahami struktur tata kelola, kerangka hukum, dan lingkungan sosial-politik tertentu yang mana korupsi dapat menghasilkan keuntungan ekonomi jangka pendek.

Secara bersamaan, penelitian ini menantang persepsi umum bahwa korupsi hanya merugikan. Meskipun memiliki potensi manfaat, penelitian ini juga menyoroti risiko jangka panjang yang signifikan, termasuk melemahnya institusi, terkikisnya kepercayaan publik, dan berlanjutnya ketimpangan. Perspektif ganda ini membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut guna mengeksplorasi kondisi yang mana dampak positif korupsi tampak bermanfaat, sambil meminimalkan konsekuensi negatifnya. Eksplorasi semacam itu dapat berkontribusi secara signifikan pada pengembangan kerangka kebijakan yang lebih bernuansa dalam tata kelola dan pembangunan.

Keterbatasan dan Saran

Meskipun analisis komprehensif telah disajikan dalam penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini terutama berfokus pada tingkat provinsi, yang mungkin tidak sepenuhnya mencakup dinamika korupsi dan PAD pada tingkat lokal atau nasional. Penelitian di masa depan sebaiknya mempertimbangkan pendekatan yang lebih terperinci dengan mengkaji dampak korupsi terhadap PAD di berbagai tingkat administrasi dan daerah. Kedua, periode studi bertepatan dengan era desentralisasi fiskal di Indonesia, yang mungkin memiliki karakteristik unik yang tidak berlaku untuk periode atau negara lain. Studi komparatif yang melibatkan negara-negara lain yang menjalani proses desentralisasi serupa dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan memvalidasi temuan. Ketiga, meskipun penelitian ini mengakui peran ganda korupsi, penekanan utamanya adalah pada manfaat ekonomi jangka pendek. Penelitian mendatang sebaiknya menggali lebih dalam dampak jangka panjang korupsi terhadap pengembangan ekonomi, kualitas tata kelola, dan kepercayaan publik. Memahami efek jangka panjang ini sangat penting untuk merancang kebijakan anti-korupsi yang berkelanjutan tanpa mengorbankan keuntungan ekonomi segera. Terakhir, penelitian ini mengidentifikasi kebutuhan untuk eksplorasi yang lebih rinci mengenai mekanisme spesifik yang mana korupsi mempengaruhi hasil ekonomi di tingkat lokal. Penyelidikan terhadap mekanisme ini dapat mengungkap strategi yang ditargetkan untuk mengurangi dampak negatif korupsi sambil memanfaatkan potensi fasilitasi ekonomi di bawah kondisi tertentu. Secara keseluruhan, mengatasi keterbatasan dan area untuk penelitian di masa depan dapat meningkatkan pemahaman kita tentang hubungan kompleks antara korupsi, tata kelola, dan pengembangan ekonomi, yang pada akhirnya berkontribusi pada kebijakan dan praktik yang lebih efektif.

Referensi

- Adiguna, R., & Sony, W. (2019). Dualitas sebagai perspektif teoretis dalam ilmu manajemen dan akuntansi. In J. M. Hartono (Ed.), *Kajian literatur dan arah topik riset ke depan* (pp. 1–25). ANDI.
- Afonso, A., & de Sá Fortes Leitão Rodrigues, E. (2022a). Corruption and economic growth: Does the size of the government matter? *Economic Change and Restructuring*, 55(2), 543–576. <https://doi.org/10.1007/s10644-021-09338-4>
- Alfada, A. (2019). Does fiscal decentralization encourage corruption in local governments? evidence from Indonesia. *Journal of Risk and Financial Management*, 12(3). <https://doi.org/10.3390/jrfm12030118>
- Arif, I., Khan, L., & Waqar, S. (2023). Does corruption sand or grease the wheels? A case of BRICS Countries. *Global Business Review*, 24(6), 1468–1481. <https://doi.org/10.1177/0972150920927370>
- Arsandi, S. A. (2022a). Regional head corruption and industrial growth: Evidence from Mojokerto Regency and City. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 103–112. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.857>
- Arsandi, S. A. (2022b). The grease of the wheel: The correlation between corruption, regional revenue and expenditure in Indonesia. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 8(2), 193–204. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i2.938>
- Changwony, F. K., & Paterson, A. S. (2019). Accounting practice, fiscal decentralization and corruption. *British Accounting Review*, 51(5). <https://doi.org/10.1016/j.bar.2019.04.003>

- Dastidar, K. G., & Jain, S. (2023). Incompetence and corruption in procurement auctions. *Economics of Governance*, 24(4), 421–451. <https://doi.org/10.1007/s10101-023-00296-3>
- Fisman, R., & Gatti, R. (2002). Decentralization and corruption: Evidence across countries. *Journal of Public Economics* (Vol. 83). www.elsevier.com/locate/econbase
- Fisman, R., Guriev, S., Ioramashvili, C., & Plekhanov, A. (2024a). Corruption and firm growth: Evidence from around the world. *The Economic Journal*, 134(660), 1494–1516. <https://doi.org/10.1093/ej/uead100>
- Fjeldstad, O.-Helge. (2004). *Decentralisation and corruption: A review of the literature* (10). Chr. Michelsen Institute, Development Studies and Human Rights.
- Henderson, J. V., & Kuncoro, A. (2011). Corruption and local democratization in Indonesia: The role of Islamic parties. *Journal of Development Economics*, 94(2), 164–180. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2010.01.007>
- Huang, C.-J. (2016). Is corruption bad for economic growth? Evidence from Asia-Pacific countries. *The North American Journal of Economics and Finance*, 35, 247–256. <https://doi.org/10.1016/j.najef.2015.10.013>
- Kamase, H. P. (2023). *Penyimpangan keuangan: Tinjauan akuntansi forensik*. PT. Pena Persada Kerta Utama.
- Kargin-Akkoc, G., & Durusu-Ciftci, D. (2024). The interrelationship between corruption, economic growth, and trade: Do they grease or sand each other's wheels? *Journal of Quantitative Economics*. <https://doi.org/10.1007/s40953-024-00414-w>
- KPK. (2023). *Laporan tahunan KPK 2023: Berbenah menutup celah*. <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/laporan>
- Kutlu, L., & Mao, X. (2023). The effect of corruption control on efficiency spillovers. *Journal of Institutional Economics*, 19(4), 564–578. <https://doi.org/10.1017/S1744137423000061>
- Mamo, D. K., Ayele, E. A., & Teklu, S. W. (2024). Modelling and analysis of the impact of corruption on economic growth and unemployment. *Operations Research Forum*, 5(2), 36. <https://doi.org/10.1007/s43069-024-00316-w>
- Martinez-Vazquez, J., Lago-Peñas, S., & Sacchi, A. (2017). The impact of fiscal decentralization: A survey. *Journal of Economic Surveys*, 31(4), 1095–1129. <https://doi.org/10.1111/joes.12182>
- Mauro, P. (1995a). Corruption and growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 110(3), 681–712. <https://doi.org/10.2307/2946696>
- Mauro, P. (1996). *The effects of corruption on growth, investment, and government expenditure: A cross-country analysis*. <http://www.iie.com>
- Quoc Bui, D., Tien Bui, S., Kim Thi Le, N., Mai Nguyen, L., The Dau, T., & Tran, T. (2021). Two decades of corruption research in ASEAN: A bibliometrics analysis in Scopus database (2000–2020). *Cogent Social Sciences*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.2006520>
- Smith, T. M. (1971). Corruption, tradition and change. *Indonesia*, 11, 21–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/3350742>
- Spyromitros, E., & Panagiotidis, M. (2022). The impact of corruption on economic growth in developing countries and a comparative analysis of corruption measurement indicators. *Cogent Economics & Finance*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2129368>
- Tanzi, V., & Davoodi, H. (1997). *Corruption, public investment, and growth* (139). <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/wp97139.pdf>
- Tanzi, V., & Davoodi, H. (1998). Corruption, public investment, and growth. In *The Welfare State, Public Investment, and Growth* (pp. 41–60). Springer Japan. https://doi.org/10.1007/978-4-431-67939-4_4

- Uddin, I., & Rahman, K. U. (2023). Impact of corruption, unemployment and inflation on economic growth evidence from developing countries. *Quality and Quantity*, 57(3), 2759–2779. <https://doi.org/10.1007/s11135-022-01481-y>
- Vial, V., & Hanoteau, J. (2010). Corruption, manufacturing plant growth, and the Asian Paradox: Indonesian evidence. *World Development*, 38(5), 693–705. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2009.11.022>
- Wei, S.-J. (1999). Corruption in economic development: beneficial grease, minor annoyance, or major obstacle? *SSRN*, 1–28. <https://ssrn.com/abstract=604923>
- World Bank. (2023). *Corruption is a global problem for development: To fight it, we all have a role to play*. <https://www.worldbank.org/en/news/opinion/2023/06/13/corruption-is-a-global-problem-for-development-to-fight-it-we-all-have-a-role-to-play>
- Yung, K., Cai, Q., & Li, D. D. (2023). Greasing the wheels of irreversible investment: International evidence on the economic effects of corruption. *Global Finance Journal*, 58, 100895. <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2023.100895>
- Zhang, M., Zhang, H., Zhang, L., Peng, X., Zhu, J., Liu, D., & You, S. (2023). Corruption, anti-corruption, and economic development. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1). <https://doi.org/10.1057/s41599-023-01930-5>

